

**KEDUDUKAN DAN UPAYA JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM
PENANGANAN KREDIT MACET ANTARA NASABAH DEBITUR
DENGAN PIHAK BANK BUMD BERDASARKAN SURAT KUASA
KHUSUS DI KEJAKSAAN NEGERI CILACAP
(Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda))**

Erna Agustin¹, Niken Wahyuning Retno Mumpuni²

INTISARI

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Selain berperan dalam sistem peradilan pidana, juga berperan dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kredit macet yang termasuk dalam permasalahan perdata merupakan kondisi yang dapat menimpa siapa saja, di mana debitur, perorangan maupun perusahaan, tidak mampu membayar kredit kepada kreditur secara tepat waktu.

Metode kualitatif dengan teknik deskriptif adalah metode yang akan digunakan untuk menganalisis data. Pihak kejaksaan dalam menjalankan kuasanya dibidang perdata dan tata usaha negara bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK). SKK ditujukan untuk dan atas nama perusahaan dalam hal ini adalah pihak bank yang tengah menghadapi permasalahan kredit macet yang sebelumnya telah dilakukan upaya penagihan oleh pihak bank kepada nasabah debitur namun tidak diindahkan. Sehingga dengan dilakukan upaya penagihan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) para debitur akhirnya melaksanakan pemenuhan kewajibannya. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara untuk memulihkan kekayaan atau keuangan negara.

Dalam setiap perjanjian kredit mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya baik pada pihak nasabah debitur maupun pihak kreditur sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang. Namun, dalam pemenuhan hak dan kewajiban biasa ditemukan suatu kelemahan. Oleh karena itu diharapkan agar setiap kelemahan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dapat di antisipasi sedini mungkin, supaya tidak terjadi kasus kredit macet.

Kata kunci: *Kejaksaan, Perdata, Kredit Macet*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**POSITION AND EFFORTS OF STATE ATTORNEY PROSECUTORS IN
HANDLING BAD CREDIT BETWEEN DEBTOR CUSTOMERS AND
BUMD BANKS BASED ON A SPECIAL POWER OF ATTORNEY IN
THE CILACAP DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE
(Case Study of PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda))**

Erna Agustin¹, Niken Wahyuning Retno Mumpuni²

ABSTRACT

The Public Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is a state institution authorized by law to exercise state power in the field of prosecution and other authorities granted by law. Apart from playing a role in the criminal justice system, it also plays a role in the fields of Civil Law and State Administration, as stated in Article 30 paragraph (2) of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. Bad credit, which is included in civil matters, is a condition that can happen to anyone, where debtors, individuals or companies, are unable to pay credit to creditors on time.

Qualitative method with descriptive technique is the method that will be used to analyze the data. The prosecutor's office in exercising its power in the field of civil and state administration acts based on a Special Power of Attorney (SKK). SKK is intended for and on behalf of the company in this case is the bank that is facing bad credit problems that have previously been made collection efforts by the bank to debtor customers but are not heeded. So that with the collection efforts made by the State Attorney (JPN) the debtors finally fulfill their obligations. This is an effort made by the State Attorney to recover state assets or finances.

In every credit agreement, there are rights and obligations as well as responsibilities for both the debtor customer and the creditor as stipulated by law. However, in the fulfillment of rights and obligations, a weakness is usually found. Therefore, it is hoped that any weaknesses owned by both parties can be anticipated as early as possible, so that bad credit cases do not occur.

Keywords: Prosecutors, Civil, Bad Credit

¹ Student of Law Study Program (S-1) Jenderal Achmad Yani University, Yogyakarta

² Lecturer of Law Study Program (S-1) Jenderal Achmad Yani University, Yogyakarta